

Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum-Forum Internasional

Assessing the Consistency of Political Attitude and Position of Melanesian Countries on the Papua Issue in International Forums

Andreas Brian Bagaskoro Bayuseno*, Reni Windiani**

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro.

email: *andreasbrian2@gmail.com, **reniwindiani@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima: 17 Juni 2020

Direvisi: 2 Oktober 2020

Disetujui: 5 Oktober 2020

doi: 10.22212/jp.v11i2.1668

Abstract

Melanesian countries such as Vanuatu, Solomon Island, Tonga, New Caledonia, Tuvalu, Nauru, and Marshall Islands often raise the Papua human rights issue in international forums. While Indonesia has already explained and provided a clear statement about Papua, Melanesian countries remain firm in their solidarity with Papua. This research seeks to find the answer why Melanesian countries keep raising the Papua human rights issue in international forums and denouncing Indonesia. The author employs the Non-Western International Relations Theory from Ibn Khaldun, particularly on the *asabiyyah* concept with 3 variables -- tribe, human needs or something to fight for, and religion -- to analyze the study case. The research finds that Melanesian countries' conducts are based on the sense of unity and collective consciousness between Papua and Melanesian countries. The bond of association and religion between Papua and Melanesian people also plays a critical role in this regard. Human needs that is identified as Human Rights for the Papuan people is the shared human needs that Melanesian people fight for.

Keywords: *Asabiyyah*; Melanesia; Non-Western International Relations Theory; Papua's Human Rights Issues.

Abstrak

Negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Kaledonia Baru, Tuvalu, Nauru, dan Kepulauan Marshall kerap kali membawa permasalahan HAM Papua dalam forum-forum internasional. Meskipun Indonesia sudah menjelaskan dan memberikan *clear statement* terkait isu di Papua, namun negara-negara Melanesia tetap solid untuk membantu Papua dan membawa isu Papua. Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengapa negara-negara Melanesia terus-menerus membawa isu Papua dalam forum-forum internasional dan mengecam Indonesia. Penulis menganalisis studi kasus dengan menggunakan *Non-Western International Relations Theory* dari Ibn Khaldun, khususnya konsep *asabiyyah* dengan 3 (tiga) variabel yakni kesukuan, kebutuhan atau apa yang diperjuangkan, dan agama. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan negara-negara Melanesia tersebut didasari oleh rasa persatuan dan kesadaran kolektif antara Papua dengan negara-negara Melanesia. Adanya ikatan rasa persaudaraan dan agama antara masyarakat Papua dan Melanesia juga turut berpengaruh. Kebutuhan manusia yang diidentifikasi sebagai Hak Asasi Manusia bagi orang Papua adalah kebutuhan bersama yang diperjuangkan oleh orang Melanesia.

Kata kunci: *Asabiyyah*; Melanesia; *Non-Western International Relations Theory*; Permasalahan HAM Papua.

Pendahuluan

Negara-negara Melanesia yang dimotori oleh Vanuatu, diikuti dengan Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Nauru, dan Kepulauan Marshall sering mengangkat konflik Papua dalam forum-forum internasional. Forum-forum Internasional yang dimaksud diantaranya adalah dalam *Melanesia Spearhead Group (MSG)*, *Pacific Island Forum (PIF)*, *Organization of African, Caribbean and Pacific States (OACPS)*, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, dan *United Nations General Assembly (UNGA)*. Beberapa contoh pembawaan kasus Papua tersebut antara lain pada 21st *MSG Leader Summit* di Port Moresby, Perdana Menteri Vanuatu Charlot Sawai menyatakan bahwa:

*"... the achievement of the political independence for our Melanesian brothers and sisters. This is the raison d'être for this group, and it must not be diluted in our wider consideration. I therefore encourage the MSG to work in collaboration with parties concerned and encouraged dialogue between Indonesia and West Papua to progress the issue...."*¹

Berlanjut di dalam forum PIF tahun 2019 di New Zealand, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu menyatakan bahwa:

*"We're very happy that now the onus is on the secretariat and the member states of PIF, including the members that are on the UN Human Rights Council, that they need to make sure that the commissioner gets to go, Indonesia should see that there is a very clear concern, and we hope that this statement will make them come to the table and work with the UN Human Rights Commissioner to make sure that visit does happen."*²

1 NN Author, "Pacific Leaders Push for UN Rights Commissioner Visit to Papua." *Radio New Zealand*, 16 Agustus 2019, diakses 14 Februari 2020, <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/396833/pacific-leaders-push-for-un-rights-commissioner-visit-to-papua>

2 NN Author, "Pacific Leaders Push for UN Rights."

Masih dalam forum yang sama, pernyataan dari Menteri Luar Negeri Vanuatu tersebut diikuti oleh Akilisi Pohiva, selaku Perdana Menteri Tonga yang menyatakan bahwa:

*"Pacific countries should not let others control them, but should instead stand together in unity and in solidarity and support the people of West Papua."*³

Selain daripada contoh-contoh yang telah dijelaskan, banyak peristiwa dimana negara-negara Melanesia mempertanyakan Indonesia terkait Papua dalam sidang umum PBB. Dari pihak Indonesia sendiri, Indonesia dalam forum-forum tersebut sudah sering memberikan klarifikasi dan pernyataan yang jelas terkait status Papua yang merupakan kedaulatan Republik Indonesia. Beberapa bukti pernyataan tersebut dapat dilihat pada pernyataan-pernyataan para diplomat Indonesia pada forum-forum internasional, seperti dalam debat umum ke-71 dalam sidang umum PBB tahun 2016, dimana Nara Rakmanita, selaku perwakilan diplomat Indonesia dalam forum tersebut menyatakan bahwa:

*"...Kami menolak mentah-mentah sindiran terus menerus dalam pernyataan mereka. Itu jelas mencerminkan ketidakpahaman mereka terhadap sejarah, situasi saat ini dan perkembangan progresif di Indonesia."*⁴

Hal yang sama kembali terulang pada pada debat umum *the 74th Session of the General Assembly* pada tanggal 24 – 30 September 2019. Perwakilan Indonesia yang secara langsung diwakilkan oleh diplomat asal Papua menyatakan bahwa negara-negara Melanesia masih belum mengerti betul terkait

3 NN Author, "Pacific Leaders Push for UN Rights."

4 Sulung Lahitani, "5 Fakta Nara Masista, Diplomat Muda yang Jadi Singa Podium di PBB," SCTV, 30 September 2016, diakses 10 Oktober 2019, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2614820/5-fakta-nara-masista-diplomat-muda-yang-jadi-singa-podium-di-pb>

fakta sejarah dan hukum internasional. Delegasi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan dialog kepada tetua adat dan perwakilan di Papua untuk menyelesaikan masalah internal Papua. Selain itu juga, adanya pembangunan di berbagai sektor terus dilakukan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo juga merupakan bukti bahwa Indonesia memperhatikan betul Papua. Keresahan Indonesia lainnya juga dapat dibuktikan dengan pernyataan Wakil Presiden Indonesia periode tahun 2014-2019, Jusuf Kala yang secara terang terang menyinggung negara-negara tersebut dalam forum UNGA pada tahun 2018, dalam pidatonya menyatakan bahwa:

“Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke wilayah negara Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri.”⁵

Bercermin dari penelitian-penelitian terdahulu, banyak penelitian sebelumnya merupakan deskripsi mengenai kasus dan hubungan Papua dengan negara-negara lainnya di Melanesia. Sebagai contoh, Adriana Elisabeth (2006) dalam jurnal “Dimensi Internasional Kasus Papua” memberikan deskripsi dan laporan bagaimana *standpoint* dunia internasional (salah satunya negara-negara Melanesia) terhadap permasalahan di Papua seperti sejarah politik Papua, keabsahan Perpera, masalah pelanggaran HAM, peran dan dominasi militer Indonesia, ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat Papua, diskriminasi rasial dan kejahatan terhadap lingkungan.⁶

5 Rita Anira, “JK: Vanuatu Selalu Munculkan Isu Tak Benar soal HAM di Papua,” *News Detik*, 28 September 2018, diakses 13 Januari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4232491/jk-vanuatu-selalu-munculkan-isu-tak-benar-soal-ham-di-papua>

6 Adriana Elisabeth, “Dimensi Internasional Kasus Papua,” *E-journal penelitian politik LIPI*, (2006): 49.

Peneliti lainnya yakni David Robie (2012) dalam penelitiannya “*Conflict reporting in the South Pacific: A critical reflexive approach to Timor-Leste and West Papua*”, menjabarkan terkait konflik-konflik yang terjadi di wilayah Melanesia (termaksud Papua dan Timor Leste) dan juga bagaimana pengaruh Geopolitik terhadap meningkatnya perhatian negara-negara Melanesia terhadap konflik yang terjadi di sesama negara Melanesia. Konflik-konflik yang disoroti antara lain perang sipil Boungenvile (1990), konflik etnis di Kepulauan Solomon (2000), konflik Timor-Timur dan juga konflik Papua. Sudut pandang, konsep dan teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian isu Papua dan internasionalisasinya didominasi oleh perspektif barat (*western view*). Sebagai sampel, John Saltford (2003) dalam bukunya yang berjudul “*The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969*” yang menjelaskan bagaimana *timeline* konflik Papua yang melibatkan Indonesia dan Belanda, serta jalan diplomasi yang ditempuh oleh kedua pihak dalam penuntasan konflik Papua. Pada akhirnya, Papua secara diplomatis diakui oleh PBB sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar hukum internasional yang sah. Penelitian lainnya, “*Diplomasi Soft Power Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)*” oleh Muhammad Afif Maulana Roziqi (2020) juga melihat *Soft Power Diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia dalam forum MSG. *Soft Power Diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia menekankan pada aspek budaya, nilai-nilai domestik dan politik luar negeri. Aspek-aspek tersebut berhasil menekan ULMWP sebagai anggota tetap dalam keanggotaan MSG. Hingga penelitian ini dilakukan, belum ada penelitian yang membahas serta menganalisa internasionalisasi kasus Papua,

serta meningkatnya solidaritas negara-negara Melanesia terhadap isu Papua dengan pendekatan teori Hubungan Internasional dari Timur.

Penelitian kualitatif ini hadir untuk menjelaskan sebab dari negara-negara Melanesia solid untuk memperjuangkan dan selalu membawa kasus Papua didalam forum-forum internasional. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hanya negara-negara Melanesia tersebut yang secara jelas dan tegas membawa kasus Papua kedalam forum-forum Internasional, dibuktikan pada pernyataan-pernyataan yang telah dijabarkan sebelumnya. Sehingga, penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar: “*Mengapa negara-negara Melanesia solid untuk memperjuangkan dan membawa kasus HAM Papua dalam forum-forum Internasional?*” Dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah penelitian ini, pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari *Non-Western International Relations Theory* dari Ibn Khaldun, seorang filsuf asal Tunisia. Teori yang dikemukakan oleh beliau sering disebut dengan teori *asabiyyah* (عصبية). Sehingga, tulisan ini hadir dengan memberikan pendekatan “baru” atau alternatif dari pendekatan timur (*eastern*) dalam menganalisis dan memahami internasionalisasi isu Papua oleh negara-negara Melanesia.

Argumen yang ingin dikembangkan atau dibuktikan dalam tulisan ini adalah bahwa tindakan negara-negara Melanesia yakni Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Nauru, dan Kepulauan Marshall yang terus menerus isu Papua dalam forum-forum internasional tersebut didasarkan pada kesatuan dan kesadaran kumpulan antara Papua dengan negara-negara Melanesia. Adanya pertalian kepaduan antara warga Papua dalam masyarakat Melanesia, diperkuat dengan

kepercayaan juga turut berpengaruh kepada dimensi internasional kasus Papua oleh negara-negara Melanesia. Penelitian terkait Papua, terkhusus dalam ranah hubungan internasional penting untuk memberikan referensi kepada publik dan akademisi hubungan internasional mengapa negara-negara Melanesia terus membawa kasus Papua. Dengan pendekatan yang baru, akan memberikan perspektif dan sudut pandang yang baru terkait internasionalisasi kasus Papua. Hasil temuan yang baru bisa mempengaruhi langkah diplomasi Indonesia kedepan terhadap negara-negara Melanesia.

Ibn Khaldun dan Non-Western International Relations Theory

Dalam penelitian Hubungan Internasional, beberapa buku yang telah membahas khusus teori-teori Hubungan Internasional dari timur. Buku “*Non-Western International Relations Theory: Perspectives On and Beyond Asia (Politics in Asia)*” yang terdiri dari beberapa jurnal dari para akademisi merupakan salah satu buku yang membahas mengenai *non-Western theory* dari berbagai negara di Asia. Tadjbakhsh (2009), dalam jurnal yang juga termuat dalam buku tersebut menuliskan bagaimana sumbangsih pemikiran dan peran filsuf-filsuf Islam dalam hubungan internasional, salah satunya melalui salah satu filsuf islam yang terkenal, yakni Ibn Khaldun. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa tiga pemikiran utama Ibn Khaldun yang memberikan sumbangsih dalam ilmu sosial adalah diantaranya *umran* (peradaban), *asabiyyah* (solidaritas), *state and state authority* (kehidupan perkotaan dan pedesaan).⁷ Salah satu konsep yaitu *asabiyyah* akan dipakai sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini untuk mengembangkan argumen awal dalam tulisan ini.

7 Seyfi Say. *Ibn Haldun'un Düşünce Sistemi ve Uluslararası İlişkiler Kuramı* (İstanbul: İlk Harf Yayınları, 2012), 3.

Istilah *asabiyyah* yang diambil dari bahasa arab “*ta’asub*” yang berarti “*bounding the turban round (his own) head*”.⁸ *Asabiyyah* diartikan sebagai tindakan seseorang atau satu kelompok membantu orang-orang nya atau kelompoknya dari serangan kelompok lain, kualitas seseorang yang marah akibat kelompoknya diserang oleh suku lain, tindakan orang yang mengundang orang lain untuk membantu kelompoknya.⁹ *Asabiyyah* juga berarti cinta dan kasih sayang seorang manusia kepada saudara-saudaranya atau tetangganya ketika salah satu darinya diperlakukan secara tidak adil atau disakiti. Secara fungsional, *asabiyyah* mengarah pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan suatu kelompok sosial.¹⁰ Hal tersebut nampak dalam pernyataan:

“...to combine or league with them in facing those who act hostility towards them whether they are wrongdoers or wronged, the action from an individual who associate with others or of him who protects the others or partisanship and a strong association with holds numbers of person closely bound based on the same opinions and interests.”¹¹

Asabiyyah pada awalnya berkembang pesat di kawasan Timur Tengah yang pada periode tersebut tatanan sosial kemasyarakatannya terdiri dari berbagai suku. Ibn Khaldun dalam bukunya “*Muqaddimah*” menggunakan *asabiyyah* dalam mengembangkan teorinya mengenai perkembangan sosial (*social development*) di wilayah Timur Tengah. Ibn Khaldun

mengklarifikasikan rasa persatuan dari semangat *asabiyyah* kedalam dua arah. Dua arah tersebut mencakup *asabiyyah* yang merujuk pada konsep persaudaraan (*solidarity*) dan *asabiyyah* yang merujuk pada fanatisme buta.¹² Istilah pertama, yakni solidaritas mempunyai makna yang positif dan mengarah pada solidaritas sosial untuk saling bekerjasama. Istilah kedua, yakni fanatisme buta mempunyai makna yang negatif. Fanatisme buta ini tidak dikehendaki oleh sistem pemerintahan terkhususnya dalam sistem pemerintahan yang menganut paham islam, karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip suatu agama.¹³ *Asabiyyah* ini sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu kelompok.¹⁴ *Assabiyyah* biasanya bangkit dari hubungan darah yang sama, atau suku bangsa/ras yang sama meskipun tidak menutup kemungkinan bisa tanpa adanya hubungan darah, namun adanya komunitas atau aliansi juga bisa menumbuhkan *asabiyyah* ini.¹⁵ Kesatuan sosial atau yang berbasis persaudaraan suku atau kelompok ini menjadi elemen pertama dalam *asabiyyah*.

Semangat *asabiyyah* lebih lanjut dijabarkan hadir karena mereka harus berjuang dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup masing-masing kelompok atau suku.¹⁶ Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat kondisi geografis Timur Tengah pada masa tersebut serba terbatas sumber daya alamnya dan suku-suku tersebut harus memenuhi kebutuhan dasar tiap anggotanya. Seiring dengan perkembangan, kebutuhan ini tidak selalu yang berbentuk benda atau yang dapat dilihat. Kebutuhan

8 Say. *Ibn Haldun’un Düşünce*, 3.

9 Halim, Mohammad Nor, Ibrahim, B (eds.), “Ibn Khaldun’s Theory of ‘Asabiyyah and its Application in Modern Muslim Society”, *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 11, No. 9 (2012): 1232.

10 Muhammad Ilham, “Konsep “Ashabiyah” dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4, No. 1 (2016): 5.

11 Halim, Ibrahim, B (eds.), “Ibn Khaldun’s Theory of ‘Asabiyyah,” 1233.

12 Ilham, “Konsep Ashabiyah,” 6.

13 Ilham, “Konsep Ashabiyah,” 8.

14 Ilham, “Konsep Ashabiyah,” 4.

15 Say. *Ibn Haldun’un Düşünce*, 3.

16 Halim, Ibrahim, B (eds.), “Ibn Khaldun’s Theory of ‘Asabiyyah,” 1233.

tersebut juga bisa terkait dengan nilai-nilai atau pandangan yang diyakini bersama dalam suatu kelompok dan layak untuk diperjuangkan. Kebutuhan sesama anggota suatu kelompok ini menjadi elemen kedua dalam teori *asabiyyah*.

Dalam *asabiyyah*, dijabarkan juga bahwa agama atau suatu kepercayaan memegang peranan penting didalam pemikiran *asabiyyah* itu sendiri. Agama sebagai perekat antar anggota kelompok atau suku sehingga semangat *asabiyyah* ini semakin kuat.¹⁷ Agama juga memberikan semangat moral dalam anggota kelompok. Ibn Khaldun menyatakan bahwa semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh faktor semangat lainnya.¹⁸ Agama mempunyai kekuatan integrasi, perekat, peyatu dan perukun. Agama dapat mempersatukan pandangan umatnya dan agama ini menjadi elemen ketiga dalam pemikiran *asabiyyah*.

Berbekal dari variabel-variabel yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam tulisan ini penulis menafsirkan data-data yang didapat dari studi literatur mengenai topik permasalahan Papua dan internasionalisasinya apakah sesuai dengan argumen awal dalam *non-Western International Relations Theory* Ibn Khaldun yaitu *asabiyyah*. Dalam metode kongruen, penggunaan teori diibaratkan sebagai alat saring yang menyortir data-data penelitian sesuai proposinya.¹⁹ Variabel atau indikator dalam penelitian ini yang diambil dari teori *asabiyyah* adalah (1) kesatuan yang berbasis pada suku, ras, suku bangsa, atau adanya aliansi, (2) berjuang untuk memenuhi suatu kebutuhan, dan (3) agama sebagai

pendukung dan perekat antar anggota. Penulis disatu sisi juga mengidentifikasi data yang sesuai dengan variabel teori tersebut.²⁰ Dengan variabel ini pula membantu dalam mengembangkan dan pembuktian argumen awal yang menyatakan tindakan negara-negara Melanesia yakni Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Nauru, dan Kepulauan Marshall yang terus menerus isu Papua dalam forum-forum Internasional tersebut didasarkan pada kesatuan dan kesadaran kumpulan antara Papua dengan negara-negara Melanesia. Adanya pertalian kepaduan antara warga Papua dalam masyarakat Melanesia, diperkuat dengan kepercayaan juga turut berpengaruh kepada dimensi internasional kasus Papua oleh negara-negara Melanesia.

Dasar-Dasar Konflik Papua

Sudah banyak penelitian yang menjabarkan terkait sejarah dan perkembangan konflik di Papua. Adriana Elisabeth (2006) dalam penelitiannya "Dimensi Internasionalisasi Kasus Papua" menyatakan bahwa permasalahan Papua mencakup sejarah politik Papua, keabsahan PERPERA, permasalahan HAM terkait ketidakadilan sosial ekonomi, diskriminasi ras, kerusakan lingkungan, peran dan dominasi militer.²¹ Kemudian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam laporannya "Papua Road Map: Menegosiasikan Masa Lampau, Memperbaiki Masa Kini, dan Mengamankan Masa Depan (2009)" mengemukakan bahwa ada empat sumber konflik yang terjadi di Papua. Sumber konflik tersebut diantaranya adalah (1) perbedaan interpretasi mengenai sejarah integrasi sebagai bagian dari negara Indonesia; (2) kekerasan yang dilakukan

17 Halim, Ibrahim, B (eds.), "Ibn Khaldun's Theory of 'Asabiyyah,'" 1233.

18 Ilham, "Konsep Ashabiyah," 6.

19 Mohammad Rosyidin, *Pedoman Skripsi Mahasiswa*. (Semarang: Departemen Hubungan Internasional, 2016), 46.

20 Rosyidin, *Pedoman Skripsi Mahasiswa*, 46.

21 Elisabeth, "Dimensi Internasionalisasi Kasus Papua", 49.

oleh negara, pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung serta impunitas yang melindungi pelanggaran HAM serius di masa lalu; (3) kegagalan pembangunan serta marjinalisasi; dan (4) diskriminasi terhadap warga asli Papua. Sumber konflik inilah yang menjadi penyebab dari permasalahan-permasalahan Papua yang sampai pada penelitian ini ditulis masih berlangsung.²²

Argumen yang berlandaskan pada penelitian dari tim kajian LIPI ini juga kurang lebih mempunyai kesamaan dengan point-point yang juga terangkum dalam laporan “Memoria Passionis di Papua”, karya Theo P.A van den Broek ofm dan J. Budi Hernawan ofm (2001). Point-point tersebut menekankan pada: (1) kondisi HAM yang sangat memprihatinkan. Baik warga Papua yang tergabung dalam kelompok pro-Papua maupun yang tidak sering kali merasa terancam karena konflik yang berkepanjangan dan juga kebutuhan dasar hidup yang berpuluh-puluh tahun sulit untuk didapat. Sehingga, rakyat Papua berpuluh-puluh tahun hidup dalam ketakutan; (2) adanya transmigrasi penduduk yang dicanangkan sejak zaman orde baru, juga perusahaan-perusahaan asing masuk membuat mereka merasa menjadi kaum minoritas di tanah mereka sendiri. Mereka terpaksa tergusur dari tanah leluhur mereka; (3) masyarakat Papua yang juga kehilangan identitas mereka. Masuknya globalisasi dan tergusurnya mereka dari tanah mereka sendiri membuat budaya masyarakat sekitar kian lama tergantikan; (4) SDA di dalam Papua juga dikuras oleh perusahaan-perusahaan tanpa adanya pertanggung jawaban dan (5) pengembangan SDM yang buruk karena

terkendala oleh infrastruktur dan kondisi jalan yang buruk dan masih dalam tahap pembangunan. Jika dikategorikan menjadi satu masalah utama, masalah utama di Papua adalah mengenai HAM.

Permasalahan yang telah dijabarkan oleh beberapa penelitian inilah menjadi salah satu faktor negara-negara Melanesia untuk membawa kasus Papua dalam forum-forum internasional. Pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu dan juga di masa ketika penelitian ini ditulis, mulai dari kasus-kasus pembunuhan, diskriminasi (rasisme), isu lingkungan dan juga masalah kesehatan menambah daftar pelanggaran HAM yang diangkat oleh negara-negara Melanesia dalam forum-forum internasional²³ sampai pada tulisan ini selesai disusun. Dalam setiap pernyataan-pernyataan dari negara Melanesia dalam forum-forum internasional, pernyataan utama mereka selalu menekankan pada pelanggaran HAM yang sudah berlangsung sejak tahun 1960. Hingga penelitian ini ditulis, negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, diikuti Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Tuvalu, Kepulauan Marshall masih mengecam dan memberikan protes kepada Indonesia terkait dengan kasus HAM ini dalam berbagai forum-forum internasional. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang selalu muncul dari negara-negara Melanesia seperti yang telah dijabarkan di bagian awal tulisan ini. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa mencegah apabila negara-negara Melanesia membawa kasus serupa dalam forum internasional. Namun, permasalahan HAM ini masih merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor lainnya.

22 Muridam S. Widjojo, Adriana Elisabeth, Rosita Dewi, et all, *Papua Road Map: Menegosiasikan Masa Lampau, Memperbaiki Masa Kini, dan Mengamankan Masa Depan* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008), 4.

23 Muridam S. Widjojo, Adriana Elisabeth, Rosita Dewi, et all, *Papua Road Map: Menegosiasikan Masa Lampau, Memperbaiki Masa Kini, dan Mengamankan Masa Depan* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008), 6.

Karakteristik Melanesia dan Manifesto *The Melanesian Way*

Negara-negara Melanesia mempunyai intensi yang bisa dikatakan spesial dengan Papua. Selain memiliki kedekatan dalam aspek Geopolitik dan Antropologi (sosial dan budaya), negara-negara tersebut juga mempunyai sejarah dan sudut pandang yang serupa. Sebagian besar negara-negara kawasan Melanesia merupakan bekas wilayah kolonialisme negara-negara. Negara-negara tersebut sebagian besar memproklamasikan kemerdekaannya pada periode tahun 1970-1980. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa contoh antara lain negara Fiji pada tahun 1970, Papua Nugini tahun 1975, kemudian Kepulauan Solomon dan Tuvalu tahun 1978, Kepulauan Marshall tahun 1979 dan Vanuatu tahun 1980.²⁴ Penulis melihat bahwasanya ada persamaan pemikiran politik antar negara-negara Melanesia. Pemikiran politik tersebut juga mengandung unsur-unsur sosial dan budaya. Tulisan ini melihat bahwasanya karakter bangsa Melanesia yang dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme nampak dalam *The Melanesian Way* yang dahulu berdampak pada semangat moral orang-orang Melanesia untuk merdeka. Semangat moral ini juga akan menjadi motivasi awal negara Melanesia untuk membantu Papua.

The Melanesian Way merupakan manifesto yang digagas oleh seorang filsuf Papua Nugini, Bernard Narokobi pada periode awal tahun 1970. *The Melanesian Way* dahulu dipublikasikan didalam surat kabar-surat kabar harian yang tersebar di wilayah Melanesia dan menjadi manifesto politik negara-negara Melanesia. Gagasan *The Melanesian Way* merupakan gagasan

yang merupakan bukti awal kesatuan sosial atau solidaritas antar orang Melanesia. *The Melanesian Way* membangkitkan semangat masyarakat Melanesia untuk merdeka pada periode tersebut. Hal tersebut Nampak pada contoh Papua Nugini yang merdeka tahun 1975, kemudian Kepulauan Solomon dan Tuvalu tahun 1978, Kepulauan Marshall tahun 1979 dan Vanuatu tahun 1980.

Penulis menyimpulkan bahwa pemikiran *The Melanesian Way* berlandas juga pada Antropologi. Sehingga bisa ditarik dalam penjelasan terkait Antropologi Sosial Budaya Melanesia yang memuat karakteristik Melanesia. *The Melanesia Way* oleh Bernard Narokobi termuat dalam 17 halaman ini mempunyai beberapa poin krusial yang penulis rangkum sebagai bukti landasan Antropologi terkait karakteristik Melanesia yang mempengaruhi hubungan Papua dengan negara-negara Melanesia. Point-point tersebut antara lain adalah (1) perlakuan tidak adil atau selalu ditindas oleh penjajah, (2) solidaritas antar ras, (3) kebebasan Melanesia, (4) Melanesian dalam sudut pandang historis geografis, (5) gerakan non-kekerasan dan perdamaian, (6)serta sprititualisme atau agama. Sehingga, dokumen *The Melanesian Way* merupakan salah satu dokumen yang krusial dalam pembuktian hubungan Papua dan Melanesia dari berbagai aspek seperti aspek geografi dan antropologi (sosial dan budaya).

Poin *pertama* adalah perlakuan tidak adil yang dialami oleh orang Malenasia. *The Melanesia Way* melihat bahwasanya dimana pun orang-orang Melanesia berada, orang Melanesia selalu ditindas dan diperlakukan tidak adil. Hal tersebut berdasar pada kesamaan sejarah yang menyatakan bahwa bangsa Melanesia merupakan wilayah kolonial, seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru dan juga Papua. *The Melanesian Way* menyatakan bahwa

²⁴ Thomas Bagus Putera Temaluru, "Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2 (2016): 581.

bangsa Melanesia mempunyai hak untuk menentukan “bebas” baik dan hidup sesuai pandangan hidup orang Melanesia perasaan senasib dan sepenanggungan, ditambah kesamaan ras dan bangsa membuat awal kesatuan sosial antar ras Melanesia yang kuat. Bukti-bukti dalam *The Melanesian Way* dapat dilihat dalam kutipan:

“everywhere in Melanesia, the people are yearning for the good life, the utopia”²⁵, kemudian “... we can choose to be ourselves in our philosophy, our life-styles and our whole beings.”²⁶ dan, “Melanesia has been invaded by a huge tidal wave from the West in the form colonization...”²⁷

Berlandaskan pada perlakuan ditindas tersebut, maka yang *kedua* timbul solidaritas antar Melanesia yang juga bagian dalam *The Melanesian Way*. *The Melanesian Way* menyatakan bahwa satu orang Melanesia merepresentasikan orang-orang Melanesia lainnya. Sehingga, jika ada satu orang Melanesia yang menderita, maka orang Melanesia lainnya akan merasakan juga. Hal tersebut bisa terjadi karena orang Melanesia meyakini bahwa meskipun mereka berpisah-pisah, mereka masih satu “desa”. Penulis melihat bahwasanya desa yang dimaksud merujuk pada arti keluarga. Bukti dari pernyataan ini dapat dilihat dalam kutipan “working it all out together, *The Melanesian Way*. Live well, Love well, and Die Happy. In a Melanesian village, everyone is related to everyone else.”²⁸

Kemudian, pembahasan berlanjut pada poin *ketiga* yaitu kebebasan Melanesia. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam terefleksikan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, olahraga, teologi, bisnis dan bidang-bidang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan:

25 Bernard Narokobi, “The Melanesian Way”, *University of Melanesia*, (1970): 5.

26 Narokobi, “The Melanesian Way,” 10.

27 Narokobi, “The Melanesian Way,” 12.

28 Narokobi, “The Melanesian Way,” 13.

“All manner of issues are open for reflection. Some of the matter will include religion, spiritual, culture, law, education, politics, economics, government, literature, business, history, sport and technology.”²⁹

Nilai kebebasan tersebut menjadi kebutuhan bersama yang diyakini oleh masyarakat Melanesia dan menjadi nilai yang diperjuangkan bersama, karena seperti pada pernyataan sebelumnya, Melanesia merupakan negara bekas kolonialisme. Selain pada aspek kebebasan, *The Melanesian Way* meyakini bahwa selama ini Melanesia berada dibawah bayang-bayang orang asing dan apa yang tertulis dan didokumentasi semuanya berasal dari perspektif orang asing. Hal tersebut tertuang dalam kutipan “Melanesia are walking in the shadow of their Western analysis, living under dreams and vision dreamt and seen by Westerners.”³⁰ Orang-orang Melanesia juga memiliki potensi untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri dan berhak untuk menikmatinya.

Setelah penjelasan terkait sudut pandang sejarah, Melanesia juga dapat dianalisis dalam poin *keempat* yaitu aspek geografis. *The Melanesian Way* menekankan bahwasanya wilayah Melanesia terdiri dari Papua (Papua Barat), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Fiji. Seperti yang tertuang dalam kutipan “Melanesia consist of West PNG, Papua New Guinea, and her outer islands, the Solomon Islands, Vanuatu, New Caledonia and Fiji.”³¹ *The Melanesian Way* meyakini bahwa wilayah ini secara geografis sebelum bangsa Eropa tiba pun telah memiliki peradaban. Sejarah bangsa Melanesia tidak dimulai ketika bangsa Eropa tiba. Sejarah yang terjadi di wilayah ini telah terjadi berpuluh-

29 Narokobi, “The Melanesian Way,” 7.

30 Narokobi, “The Melanesian Way,” 14.

31 Narokobi, “The Melanesian Way,” 7.

puluh tahun lamanya. Hal tersebut nampak dalam kutipan berikut:

*“Melanesia managed to live on these islands for thousands of years before European came into contact with them,”*³² dan juga *“Our history did not begin with the contact with the Western explorers, Because we have an ancient civilization, it is important to us to give proper dignity and place to our history.”*³³

The Melanesian Way dalam mencapai nilai-nilai kebebasan (yang telah dijabarkan dalam poin ketiga cenderung menekankan pada gerakan non-kekerasan dan perdamaian untuk mencapai kebebasan tersebut. *Kelima*, gerakan-gerakan non-kekerasan tersebut juga terdapat pengaruh dari spiritualitas orang-orang Melanesia, khususnya Kristen Protestan dan Katholik yang akan dibahas lebih lanjut dalam poin berikutnya. Gerakan non-kekerasan dan perdamaian pada mulanya terangkum dalam berbagai kesenian dan juga pentas seni yang cukup sering dilakukan oleh orang-orang Melanesia, kemudian berkembang menjadi kelompok kesenian. Hal tersebut tertuang dalam kutipan *The Melanesian Way* yang menyatakan bahwa:

*“To me, the peaceful, non-violent, person to person way in which the Bougainville-Papua New Guinea Government conflict has been resolved is a proud tribute to the wisdom of Melanesians. That is a Melanesian Way.”*³⁴

Beberapa contoh dari grup seni yang membawa nilai kebebasan antara lain grup musik asal Papua yang bernama “Membesak” besutan aktivis Papua bernama Arnold AP, juga grup jazz “The Party Pop Song Melanesia.”³⁵

32 Narokobi, “The Melanesian Way,” 5.

33 Narokobi, “The Melanesian Way,” 8.

34 Narokobi, “The Melanesian Way,” 6.

35 Webb-Gannon and Webb, “Musical Melanesianism: Imagining and Expressing Regional Identity and Solidarity in Popular Song and Video”, *Contemporary Pacific*, Vol.28, No.1 (2016): 59-95.

Gerakan-gerakan non-kekerasan ini lebih diutamakan untuk memperjuangkan suatu aspirasi, terlebih lagi yang berhubungan dengan Melanesia. Gerakan *non-violence* selain pada grup kesenian berkembang kembali menjadi beberapa bentuk seperti lobi politik dan diplomasi, khususnya diplomasi internasional seperti yang telah dideskripsikan pada awal penelitian.

Poin terakhir, atau yang *keenam* adalah spiritualisme atau kepercayaan di wilayah Melanesia. Spritual yang dimaksud adalah pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat Melanesia. Spritualisme agama merupakan perekat antar suku dalam budaya Melanesia. Selain sebagai perekat, ajaran-ajaran yang termuat dalam agama, khususnya agama Kristen Protestan dan Katholik (mayoritas) menekankan pada ajaran cinta kasih, tidak melalui jalan kekerasan, mengasihi sesama manusia. Lebih jauh lagi, *The Melanesian Way* menyatakan bahwa masyarakat Melanesia merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi spiritualitas bahkan sebelum kristen masuk di tanah Melanesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan:

*“As Melanesians, we are a spiritual people. Even before Christians came onto our shores, we felt knew the forces of a source greater than ourselves. That was our divine power, The Melanesian Way.”*³⁶

Dari beberapa penjabaran yang telah dilakukan penulis, dapat dilihat beberapa karakteristik masyarakat Melanesia yakni mengedepankan kebebasan orang Melanesia, solidaritas yang kuat antar sesama Melanesia, mengedepankan jalan non-kekerasan (mulai dari seni sampai pada diplomasi), dan masyarakatnya sangat mengedepankan spiritualitas. Beberapa karakteristik tersebut nampak pada kasus internasionalisasi kasus Papua, dimana

36 Narokobi, “The Melanesian Way,” 12.

Papua masih satu saudara dengan negara-negara Melanesia lainnya. Karakteristik ini akan tersambung dengan tiga variabel dari *asabiyyah theory*.

Internasionalisasi Kasus Papua dan Teori Assabiyyah

Pada setiap kesempatan, negara-negara Melanesia sering berusaha untuk memasukkan kasus Papua sebagai pembahasan.³⁷ Dari analisis penulis dengan studi literasi dan wawancara, skema yang dibawa oleh negara-negara Melanesia ketika membawa kasus Papua dalam forum internasional kurang lebih selalu sama, yakni negara-negara Melanesia akan selalu menjabarkan pelanggaran HAM yang menyangkut pada ketidakadilan sosial ekonomi, diskriminasi ras, kerusakan lingkungan, peran dan dominasi militer di Papua.³⁸ Pembahasan dalam tulisan ini yang berawal dari argumen awal membawa pada satu analisis dengan teori *asabiyyah* yang terbagi dalam 3 (tiga) variabel yakni solidaritas, kebutuhan, dan agama atau kepercayaan. Tiga variabel ini juga tersambung dengan karakteristik masyarakat Melanesia yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Kesatuan Sosial Melanesia

Variabel pertama dari semangat *asabiyyah* adalah hubungan darah yang sama, atau suku bangsa/ras yang sama. Satu suku atau kelompok akan membantu sesama anggota suku atau kelompoknya yang mengalami kesulitan. Secara singkat, dengan semangat *asabiyyah* ini Ibnu

Khaldun meyakini bahwa suatu komunitas atau kelompok akan bertahan hidup dan kemudian akan membentuk suatu kelompok yang kuat. Dalam studi kasus, terdapat pertalian kepaduan antara warga Papua dalam kumpulan masyarakat Melanesia. Semangat *asabiyyah* mendorong negara-negara Melanesia bersatu untuk menolong sesama wilayah Melanesia yang mengalami kesulitan.

Dalam studi kasus, faktor-faktor kesatuan sosial yang terbentuk antara lain adalah berupa dari perlakuan tidak adil atau selalu ditindas oleh penjajah, solidaritas satu ras, dan kebebasan Melanesia. *The Melanesia Way* melihat dan menekankan bahwasanya dimanapun orang-orang Melanesia berada, orang Melanesia selalu ditindas dan diperlakukan tidak adil. Hal tersebut berdasar pada kesamaan sejarah yang menyatakan bahwa bangsa Melanesia merupakan negara-negara bekas kolonialisme, seperti yang telah dijelaskan dalam *The Melanesian Way*. Negara-negara Melanesia melihat bahwa saudaranya di Papua masih mengalami kesulitan-kesulitan yang telah dijelaskan dalam dasar konflik Papua. Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan, ditambah kesamaan ras dan bangsa membuat awal kesatuan sosial antar ras Melanesia yang kuat. Berlandaskan pada perlakuan ditindas tersebut, maka timbulah satu rasa antar Melanesia. Satu orang Melanesia merepresentasikan orang-orang Melanesia lainnya. Sehingga, jika ada satu orang Melanesia yang menderita, maka orang Melanesia lainnya akan merasakan juga. Hal inilah yang mengarah pada solidaritas Melanesia.

Faktor-faktor seperti persamaan nasib, solidaritas dan kebebasan yang telah dijelaskan termaksud dalam Antropologi sosial membuat kesatuan sosial yang kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan-

37 M. Musa Hasyim, "Diplomasi Indonesia Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) Terhadap Penjagaan Kedaulatan NKRI di Papua Barat Periode 2013-2016", *Skripsi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah*, (2017): 8

38 Elisabeth, "Dimensi Internasional Kasus Papua," 50.

pernyataan para petinggi kepala Melanesia dalam berbagai forum-forum internasional. Seperti pada pernyataan Octovianus Mote sebagai wakil ketua ULMWP dalam MSG tahun 2013 juga menyatakan bahwa:

*“This decision awakening our melanesian brother and sister in all Melanesian countries. You signalled to not just us as leaders but the entire people of West Papua your commitment to strengthen our Melanesian solidarity.....”*³⁹

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Sawai dalam 21st MSG Leader Summit di Port Moresby, Papua Nugini juga menyatakan hal yang serupa bahwa:

*“.... the achievement of the political independence for our Melanesian brothers and sisters. This is the raison d'être for this group, and it must not be diluted in our wider consideration. I therefore encourage the MSG to work in collaboration with parties concerned and encouraged dialogue between Indonesia and West Papua to progress the issue.”*⁴⁰

Pada tahun berikutnya, Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva yang pada tahun 2019 di dalam forum PIF menyatakan bahwa:

*“Pacific countries should not let others control them, but should instead stand together in unity and in solidarity and support the people of West Papua.”*⁴¹

Wadah untuk menolong sesama Melanesia ini kemudian tertuang dengan

39 Octovianus Mote, “United Liberation Movement on West Papua,” *United Liberation Movement on West Papua*, 20 Juni 2015, Diakses 18 Januari 2020, <https://www.msgsec.info/wp-content/uploads/Statements/2015-Jun-20th-MSG-Leaders-Summit-Statement-by-Octovianus-Mote-Sec.-General-ULMWP.pdf>

40 Government of Vanuatu, “Statement of The Prime Minister during the opening of the MSG Leader,” 15 Februari 2018, diakses 17 Desember 2019, <https://www.gov.vu/en/public-information/501-statement-of-the-prime-minister-during-the-opening-of-the-msg-leader-summit>

41 NN Author, “Pacific Leader Push.”

penandatanganan *The Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia* dan menjadi dasar dari pembentukan MSG. Dari pengangkatan topik Papua dalam forum MSG, kemudian kasus Papua berlanjut kedalam forum-forum internasional lainnya. Dengan semangat *asabiyyah* (sesuai dengan analisis dari variabel pertama) komunitas Melanesia dapat bertahan dan eksistensi Melanesia di ranah internasional.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, tulisan ini melihat bahwa semangat *asabiyyah* dalam studi kasus ini merujuk pada persaudaraan atau solidaritas sesama kaum Melanesia, bukan mengarah pada fanatisme buta. Bukti yang memperkuat pernyataan ini bisa dilihat dari filosofi awal *The Melanesian Way*. Dalam *The Melanesian Way*, solidaritas tersebut nampak antara lain pada pernyataan “satu orang Melanesia merepresentasikan orang-orang Melanesia lainnya,”⁴² ataupun juga perasaan senasib sebagai masyarakat yang selalu ditindas oleh penjajah di masa lampau. Seperti yang telah dijelaskan, orang Melanesia meyakini bahwa mereka meskipun berpisah-pisah, mereka masih satu “desa”.⁴³ Penulis melihat bahwasanya desa yang dimaksud merujuk pada arti keluarga. Hal tersebut juga termuat dalam kutipan:

*“working it all out together, The Melanesian Way. Live well, Love well, and Die Happy. In a Melanesian village, everyone is related to everyone else.”*⁴⁴

Bukti yang menunjukkan solidaritas antar sesama Melanesia dapat dilihat di dalam pernyataan Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva dalam forum PIF tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

42 Narokobi, “The Melanesian Way,” 10.

43 Narokobi, “The Melanesian Way,” 13.

44 Narokobi, “The Melanesian Way,” 15.

"Pacific countries should not let others control them, but should instead stand together in unity and in solidarity and support the people of West Papua."⁴⁵

Kebutuhan Dasar Sesama Melanesia

Variabel kedua dari teori *asabiyyah* adalah perjuangan sesama suku atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar antaranggota suku atau kelompok. Pada Ibn Khaldun, semangat *asabiyyah* hadir karena mereka harus berjuang dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup masing-masing kelompok atau suku. Seiring dengan perkembangan, kebutuhan ini tidak selalu berbentuk benda atau yang dapat dilihat. Kebutuhan tersebut juga bisa terkait dengan nilai-nilai atau pandangan yang diyakini bersama dalam suatu kelompok dan layak untuk diperjuangkan.

Dalam studi kasus, seperti yang tertuang dalam *The Melanesia Way* yang menyatakan bahwa orang Melanesia selalu ditindas dan diperlakukan tidak adil, bahkan di tanah mereka sendiri. Negara-negara Melanesia melihat bahwa kebutuhan orang Papua tidak terpenuhi dan kehidupan orang Papua menjadi sulit di tanah mereka sendiri. Berangkat dari hal yang sama, negara-negara Melanesia melihat bahwa pemerintah Indonesia berlaku tidak adil kepada rakyat Papua. Melihat secara langsung, dan disertai dengan laporan-laporan yang telah dijabarkan dalam dasar-dasar konflik Papua sudah cukup untuk negara Melanesia merefleksikan dan melihat bahwa "saudaranya" di tanah Papua mengalami kesulitan. Orang-orang Melanesia juga memiliki potensi untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri dan berhak untuk menikmatinya dan berhak lepas dari bayang-bayang orang asing. Hal tersebut tertuang dalam kutipan:

45 NN Author, "Pacific Leader Push."

"Melanesia are walking in the shadow of their Western analysis, living under dreams and vision dreamt and seen by Westerners."⁴⁶

Sehingga Papua dalam sudut pandang orang Melanesia layak untuk "bebas" dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, olahraga, teologi, bisnis dan bidang-bidang lainnya, seperti yang diungkapkan bahwa:

"All manner of issues are open for reflection. Some of the matter will include religion, spiritual, culture, law, education, politics, economics, government, literature, business, history, sport and technology."⁴⁷

The Melanesian Way menyatakan bahwa untuk mencapai kebebasan (HAM), orang Melanesia menekankan pada gerakan non-kekerasan dan perdamaian. Gerakan non-kekerasan dan perdamaian tersebut pada mulanya terangkum dalam berbagai kesenian dan juga pentas seni yang dilakukan oleh orang-orang Melanesia.⁴⁸ Di kemudian hari, gerakan-gerakan non-kekerasan ini lebih populer untuk memperjuangkan suatu aspirasi. Gerakan *non-violence* ini kemudian berkembang menjadi beberapa bentuk seperti mengemukakan pendapat, lobi politik dan diplomasi, khususnya diplomasi internasional. Diplomasi tersebut terlihat dalam berbagai forum internasional, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Selain itu juga, dalam setiap pernyataan beberapa petinggi-petinggi negara-negara Melanesia dalam forum internasional, selalu menekankan pada HAM. Sebagai tambahan contoh yang sebelumnya telah dijabarkan sebelumnya, dalam forum ACP terkait Papua, menghasilkan resolusi terkait Papua. Resolusi tersebut terdiri dari 4 (empat) butir pembahasan yang menekankan

46 Narokobi, "The Melanesian Way," 15.

47 Narokobi, "The Melanesian Way," 17.

48 Webb-Gannon and Webb, 'Musical Melanesianism,' 59.

bahwa negara-negara Melanesia menuntut komisi PBB untuk HAM (UNHRC) untuk melakukan investigasi ke Papua terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lampau dan sekarang.⁴⁹ Bukti lainnya dapat dilihat juga dalam beberapa pernyataan para petinggi negara Melanesia, seperti yang dikemukakan oleh Octovianus Mote sebagai wakil ketua ULMWP dalam MSG tahun 2013 juga menyatakan bahwa:

“..... At the 19th MSG Leaders Summit in Noumea you also raised your concerns relating to human rights violations and atrocities in West Papua. These decisions gave us hope.”⁵⁰

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai dalam UNGA tahun 2017 di New York, juga menyatakan hal yang serupa. Beliau menyatakan bahwa:

“We also call on our counterparts throughout the world to support the legal right of West Papua to self-determination and to jointly with Indonesia put an end to all kinds of violence and find common ground to facilitate a process to make their own choice.”⁵¹

Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu pada tahun 2019 menyatakan hal serupa terkait HAM Papua dan penekanan pada komisi PBB untuk HAM (UNHRC) untuk melakukan investigasi ke Papua terkait pelanggaran HAM. Beliau menyatakan bahwa:

“We’re very happy that now the onus is on the secretariat and the member states of PIF, including the members that are on the UN Human Rights Council, that they need to make sure that the commissioner gets to go, Indonesia should see that there is a very clear

concern, and we hope that this statement will make them come to the table and work with the UN Human Rights Commissioner to make sure that visit does happen.”⁵²

Kedekatan dan Kesamaan Aspek Spiritualitas Antar Melanesia

Variabel ketiga, Ibn Khaldun dalam pembahasan buku “Muqaddimah” menjabarkan bahwa agama atau kepercayaan memegang peranan yang penting didalam pengertian *asabiyyah* itu sendiri. Agama sebagai perekat antar anggota kelompok atau suku sehingga semangat *asabiyyah* ini semakin kuat. Agama mempunyai kekuatan integrasi, perekat, penyatu dan perukun. Dengan kata lain, agama merupakan elemen ketiga dalam teori *asabiyyah*.

Dalam studi kasus, ada kedekatan dalam aspek agama atau kepercayaan antara orang Papua dengan orang Melanesia. Spiritual yang dimaksud adalah bagaimana pengaruh agama dalam kehidupan Melanesia. Spiritualisme agama merupakan salah satu perekat antar suku dalam budaya Melanesia. Seperti yang dikemukakan pada awal penelitian, agama mempunyai kekuatan integrasi, perekat, penyatu dan perukun.⁵³ Selain sebagai perekat, ajaran-ajaran yang termuat dalam agama, khususnya agama Kristen Protestan dan Katholik (sebagai agama mayoritas) yang menekankan pada ajaran cinta kasih, tidak melalui jalan kekerasan, mengasihi sesama manusia. Telah dijelaskan sebelumnya dalam *The Melanesian Way* bahwa masyarakat Melanesia merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi spiritualitas bahkan sebelum kristen masuk di tanah Melanesia. Seperti yang terungkap dalam pernyataan berikut:

“As Melanesians, we are a spiritual people. Even before Christians came onto our shores, we felt knew the forces of a source greater than

49 NN Author, “Africa Caribbean Pacific Group Seeks Action on Papua Right Abuse,” *Radio New Zealand*, 16 Desember 2019, diakses 3 Januari 2020, <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/405595/africa-caribbean-pacific-group-seeks-action-on-papua-rights-abuses>

50 Mote, “United Liberation Movement on West Papua.”

51 NN Author, “Pacific Leader Push.”

52 NN Author, “Pacific Leader Push.”

53 Ilham, “Konsep “Ashabiyah,” 5.

ourselves. That was our divine power, The Melanesian Way."⁵⁴

Telah dijelaskan juga dalam pembahasan karakteristik Melanesia, bahwasanya masyarakat Papua mayoritas beragama Kristen dan Katolik, meskipun banyak kepercayaan sekitar yang masih berkembang. Dari agama tersebut, mereka sering kali mencurahkan isi hati dan pikiran mereka menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Tidak hanya di negara-negara Melanesia saja, Gereja mempunyai cabang di hampir setiap negara. Gereja juga sering mengeluarkan laporan-laporan terkait apa yang terjadi di Papua. Ketika laporan tersebut disebarkan dan dibaca umat Kristiani Melanesia menaruh simpati terhadap Papua terkait pelanggaran HAM di Papua. Sebagai bukti awal, simpati tersebut dapat dilihat dalam berbagai pernyataan, seperti yang diutarakan oleh perwakilan *bishops from the Anglican Church of Aotearoa, New Zealand and Polynesia (ANZP)* yang menyatakan bahwa:

*"We also endorse the resolution by the Pacific Conference of Churches, as the regional ecumenical body, to nominate two Pacific church leaders to visit governments and heads of state in Papua New Guinea, Solomon Islands, Nauru, Samoa, and Fiji in the next two years to bring the concerns of the Pacific churches on West Papua to their attention."*⁵⁵

Ataupun dalam pernyataan lainnya namun masih dalam lingkup yang sama yang menyatakan bahwa:

"we stand with our sisters and brothers in West Papua in their struggle to determine their own

*political destiny, and we pray that the Indonesian government will halt all state-sanctioned abuse and violation of human rights there."*⁵⁶

Pernyataan lainnya juga nampak dari gereja-gereja di Kepulauan Solomon, Vanuatu, Tonga, Kepulauan Marshall, Nauru, dan Tuvalu yang diwakili oleh *Catholic Bishops*. Mereka menyatakan bahwa orang Papua dalam penyelesaian masalah selalu mengedepankan perdamaian dan dialog. Hal ini nampak dalam pernyataan berikut:

*"The large majority of indigenous people of Papua seek peace and the various dialogue groups, advocating and witnessing to peaceful co-existence, are a source of hope for all."*⁵⁷

Pernyataan dari ketua Vanuatu *Christian Council*, Pastor Alain Fanuki pada tahun 2019, setelah memberikan kebaktian yang diselenggarakan pada hari minggu juga mengungkapkan hal yang serupa. Beliau menyatakan bahwa:

*"At this challenging time in West Papua, I am therefore calling all Christian churches in Vanuatu to pray for the Indonesian Government leaders in Jakarta and the leaders of the Indonesian police and military, for God to intervene in their lives to pave the way towards granting the ultimate wish of the people of West Papua."*⁵⁸

Sebagai bukti lanjut terkait intensi agama dalam pembawaan kasus Papua dapat dilihat dalam beberapa acara keagamaan yang ditunjukkan khusus untuk masyarakat Papua. Beberapa contoh implementasi

54 Narokobi, "The Melanesian Way," 16.

55 David Worabay, "Bishops from New Zealand and Polynesia issue joint protest on West Papua abuses," *Anglican Communion News Service*, 17 Desember 2018, diakses 27 Februari 2020, <https://www.anglicannews.org/news/2018/12/bishops-from-new-zealand-and-polynesia-issue-joint-protest-on-west-papua-abuses.aspx>

56 Worabay, "Bishops from New Zealand."

57 Mark Bowling, "Almost Two Million People Calling For A Vote On Independence From Indonesia," *The Catholic Leader*, 7 Oktober 2019, diakses 30 Maret 2019, <https://catholicleader.com.au/news/almost-two-million-people-calling-for-a-vote-on-independence-from-indonesia>

58 Lee Garae, "Churches urged to pray for West Papua," *Daily Vu*, 30 November 2019, diakses 21 Januari 2019, https://dailypost.vu/news/churches-urged-to-pray-for-west-papua/article_c430ca0e-1554-11ea-9ef3-476aa316322a.html

dari simpati tersebut bisa terlihat dalam beberapa bentuk kegiatan, di antaranya adalah kunjungan langsung ke tanah Papua, doa bersama antar umat memohon perlindungan untuk rakyat Papua, dan unjuk rasa mendesak dunia internasional untuk memperhatikan Papua. Beberapa contoh kegiatan tersebut antara lain pada tahun 2013, dimana *Vanuatu Christian Council* menyatakan telah meloloskan sebuah resolusi kepada *World Council of Churches* terkait dengan investigasi pelanggaran HAM di tanah Papua. Resolusi tersebut diharapkan dapat menekan UNHCR untuk ditindaklanjuti dan investigasi di Papua dapat dijalankan.⁵⁹ Namun investigasi tersebut belum terlaksana sampai pada penelitian ini ditulis.

Pada tahun 2016, *The Pacific Islands Association of NGOs* (PIANGO) memberitakan kepada *World Council of Churches* (WCC) untuk menyampaikan permasalahan Papua dalam pertemuan MSG tahun 2016 yang diselenggarakan di Honiara, Kepulauan Solomon.⁶⁰ Mereka meyakini bahwa WCC bisa membantu dalam penyelesaian kasus HAM Papua. Sebelum pertemuan MSG leader summit tahun 2016 tersebut, terjadi aksi demonstrasi damai yang mengatasnamakan *Church of Melanesia* untuk menekan MSG membahas dan mengambil langkah kasus Papua dalam forum. Mereka berpendapat bahwa,

*“WCC has called for this visit to demonstrate the ecumenical movement’s accompaniment of the churches in the region, to hear the voices of the victims of violence and human rights violations, and to pursue the pilgrimage of justice and peace.”*⁶¹

59 PMC Editor, “PIANGO welcomes World Churches call for West Papua solidarity visit,” *Asia Pacific Report*, 9 Juli 2016, diakses 5 Januari 2020, <https://asiapacificreport.nz/2016/07/09/piango-welcomes-world-churches-call-for-west-papua-solidarity-visit/>

60 PMC Editor, “PIANGO welcomes World.”

61 PMC Editor, “PIANGO welcomes World.”

Selain itu juga, mereka menyatakan telah meminta dukungan kepada organisasi-organisasi Gereja lainnya. Seperti yang terungkap dalam pernyataan berikut:

*“WCC has called on its member churches to pray and act in support of the witness of the churches especially the Evangelical Christian Church in Tanah Papua, and through the Communion of Churches in Indonesia (PGI), the Pacific Conference of Churches (PCC), and the Christian Conference of Asia (CCA) — for justice and peace in the region.”*⁶²

Penutup

Penelitian penulis yang berangkat dari pertanyaan dasar “mengapa negara-negara Melanesia solid untuk memperjuangkan dan membawa kasus HAM Papua dalam forum-forum Internasional” dapat dijawab melalui pendekatan teori Asabiyyah (*Non-Western Internasional Relations Theory*) dengan menekankan pada 3 (tiga) variabel yakni (1) satu suku, ras, suku bangsa, adanya aliansi, (2) berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau bersama, dan (3) agama sebagai pendukung dan perekat antar anggota. *Pertama*, kedekatan secara geografis, dan karakteristik satu saudara yang sama membuat mereka membawa kasus Papua dalam forum internasional. Hal ini sebagai bentuk bantuan kepada saudara sendiri yang sedang kesulitan. Poin pertama ini sesuai dengan karakteristik bangsa Melanesia terkait solidaritas. *Kedua* adalah kebutuhan bersama, yaitu HAM yang dilihat sebagai kebutuhan bersama orang-orang Melanesia. Mereka melihat bahwasanya saudaranya sendiri di Papua mengalami kesulitan dan kerap terjadi pelanggaran HAM. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan negara-negara Melanesia dalam forum-forum internasional yang selalu berfokus pada HAM Papua. Hal ini sesuai dengan

62 PMC Editor, “PIANGO welcomes World.”

karakteristik bangsa Melanesia yang cinta kebebasan. *Ketiga*, adanya kedekatan dari segi kepercayaan dan agama membuat hubungan Papua dengan negara-negara Melanesia erat. Hal ini dapat dilihat dari adanya perang institusi agama yang juga bersuara terkait Papua. Kepercayaan di Melanesia sangat kuat, dan itu menjadi salah satu ciri karakteristik Melanesia. Dari variabel-variabel yang telah dijabarkan, semangat *asabiyyah* dalam studi kasus ini merujuk pada persaudaraan atau solidaritas sesama kaum Melanesia. Solidaritas inilah yang menjadi semangat Melanesia untuk membantu Papua dengan membawa kasus Papua dalam forum-forum internasional atau yang disebut juga jalur non-kekerasan.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terkait kasus yang terjadi di Papua beserta dengan dimensi internasionalnya dengan negara-negara Melanesia, penelitian ini menyarankan beberapa hal. *Pertama*, Pemerintah Indonesia disarankan untuk sering melakukan dialog kepada warga Papua khususnya warga Papua yang menjadi korban kekerasan. Pemerataan pembangunan merupakan hal yang bagus dan sangat vital, namun jika tidak dibarengi dengan dialog sampai pada unit terkecil dari masyarakat, masyarakat Papua tetap akan merasakan dampak dari kekerasan, terkhususnya di masa lampau. Penuntasan kasus yang terjadi di masa lampau dan yang baru-baru terjadi juga penting, terlebih identitas Indonesia di mata internasional sebagai anggota Dewan HAM. Dialog dengan negara-negara Melanesia juga perlu dilakukan, dengan menunjukkan data dan pembangunan yang terjadi di Papua. *Kedua*, ucapan atau perkataan memegang peranan penting dalam hubungan internasional. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam internasionalisasi kasus Papua, sebaiknya memahami kembali penggunaan kata-

kata seperti kolonialisme, kebebasan, pembebasan, dan kemerdekaan dalam konteks Papua. Karena makna dan pengertian dari setiap kata tersebut berbeda dan bisa memberikan pemikiran yang berbeda juga. *Ketiga*, ada banyak sekali aspek-aspek di Papua yang bisa menjadi bahan penelitian kedepan. Tidak hanya dalam studi hubungan internasional, namun bisa dalam studi-studi disiplin ilmu lainnya. Bahan-bahan dari Papua yang bisa diteliti antara lain seperti pada aspek lingkungan, budaya, ekonomi dan kejahatan transnasional. Diharapkan untuk penelitian kedepan, atau penelitian untuk tingkat yang lebih tinggi bisa melakukan studi lapangan secara langsung dan wawancara secara langsung juga kepada warga Papua. Kelemahan dari penelitian ini adalah penelitian ini masih mengandalkan data-data dari studi literasi dan masih minim data dari lapangan atau wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav and Barry Buzan, *Non-Western International Relations Theory: Perspective on and beyond Asia*. New York: Routledge, 2010.
- Anira, Rita. "JK: Vanuatu Selalu Munculkan Isu Tak Benar soal HAM di Papua." *News Detik*, 28 September 2018. Diakses 13 Januari 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4232491/jk-vanuatu-selalu-munculkan-isu-tak-benar-soal-ham-di-papua>.
- Bowling, Mark. "Almost Two Million People Calling For A Vote On Independence From Indonesia." *The Catholic Leader*, 7 Oktober 2019. Diakses 30 Maret 2019. <https://catholicleader.com.au/news/almost-two-million-people-calling-for-a-vote-on-independence-from-indonesia>.

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Elisabeth, Adriana. "Dimensi Internasional Kasus Papua." *e-journal penelitian politik LIPI*, (2006): 43-65.
- Elmslie, Jim, Webb-Gannon, Camellia, "A slow-motion genocide: Indonesia rule in West Papua", *Griffith Journal of Law and Human Dignity*, Vol.1, No.2 (2014): 142-166.
- Gada, Mohamed Yassen, "Ethnic Violence and Conflict: The Dynamics of Ibn Khaldun's Theory of Asabiyyah (Social Feeling)", *Ibn Haldun Calismalari Dergisi*, Vol.3, No.2 (2018): 189-202.
- Garae, Lee. "Churches urged to pray for West Papua", *Daily Vu*, 30 November 2019. Diakses 21 Januari 2019. https://dailypost.vu/news/churches-urged-to-pray-for-west-papua/article_c430ca0e-1554-11ea-9ef3-476aa316322a.html.
- Geissler, Wim. "Mencermati Pertemuan Uskup-Uskup Pasifik di PNG Bahas Isu Papua." *Qureta*, 24 Maret 2018. Diakses 16 Februari 2020. <https://www.quireta.com/post/uskup-uskup-pasifik-kembali-soroti-isu-papua>.
- Global Church Author. "Pope's number two joins Bishops of Oceania Assembly in Port Moresby to discuss climate changes and human rights." *Global Church*, 19 Maret 2018. Diakses 11 Maret 2020. <https://www.catholic.org.nz/news/media-releases/popes-number-two-joins-bishops-of-oceania-at-assembly-in-port-moresby-to-discuss-climate-change-and-human-rights/>.
- Government of Vanuatu, "Statement of The Prime Minister during the opening of the MSG Leader." 15 Februari 2018. Diakses 17 Desember 2019. <https://www.gov.vu/en/public-information/501-statement-of-the-prime-minister-during-the-opening-of-the-msg-leader-summit>
- Halim, Mohammad Nor, Ibrahim, B (eds.), "Ibn Khaldun's Theory of 'Asabiyyah and its Application in Modern Muslim Society", *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol.11, No.9 (2012): 1232-1237.
- Hasyim, M. Musa Al. "Diplomasi Indonesia Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) Terhadap Penjagaan Kedaulatan NKRI di Papua Barat Periode 2013-2016", *Skripsi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah*, (2017):1-147.
- Ilham, Muhammad, "Konsep "Ashabiyah" dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", *Jurnal Politik Profetik*, Vol.4, No.1 (2016):1-13.
- Lahitani, Sulung. "5 Fakta Nara Masista, Diplomat Muda yang Jadi Singa Podium di PBB." SCTV, 30 September 2016. Diakses 10 Oktober 2019. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2614820/5-fakta-nara-masista-diplomat-muda-yang-jadi-singa-podium-di-pb>.
- Mote, Octovianus. "United Liberation Movement on West Papua." *United Liberation Movement on West Papua*. 20 Juni 2015. Diakses 18 Januari 2020. <https://www.msgsec.info/wp-content/uploads/Statements/2015-Jun-20th-MSG-Leaders-Summit-Statement-by-Octovianus-Mote-Sec.-General-ULMWP.pdf>.
- Narokobi, Bernard, "The Melanesian Way", *University of Melanesia*, (1970): 3-17.

- NN Author. "7 Negara Pasifik Desak PBB Selidiki Pelanggaran HAM di Papua." *Deutsche Welle*, 3 Maret 2017. Diakses 14 Januari 2019. <https://www.dw.com/id/7-negara-pasifik-desak-pbb-selidiki-pelanggaran-ham-di-papua/a-37777030>.
- NN Author. "Africa Caribbean Pacific Group Seeks Action on Papua Right Abuse." *Radio New Zealand*, 16 Desember 2019. Diakses 3 Januari 2020. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/405595/africa-caribbean-pacific-group-seeks-action-on-papua-rights-abuses>.
- NN Author. "Fiery debate over West Papua at UN General Assembly." *Radio New Zealand*, 17 September 2017. Diakses 30 April 2019. <https://www.rnz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/201860156/fiery-debate-over-west-papua-at-un-general-assembly>.
- NN Author. "Pacific Leader Push for UN Right Commissioner Visit to Papua." *Radio New Zealand*, 16 Agustus 2019. Diakses 14 Februari 2020. <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/396833/pacific-leaders-push-for-un-rights-commissioner-visit-to-papua>.
- PMC Editor. "PIANGO welcomes World Churches call for West Papua solidarity visit." *Asia Pacific Report*, 9 Juli 2016. Diakses 5 Januari 2020 <https://asiapacificreport.nz/2016/07/09/piango-welcomes-world-churches-call-for-west-papua-solidarity-visit/>.
- Rosyidin, Mohammad. *Pedoman Skripsi Mahasiswa*. Semarang: Departemen Hubungan Internasional, 2016.
- Say, Seyfi. *İbn Haldun'un Düşünce Sistemi ve Uluslararası İlişkiler Kuramı*. İstanbul: İlk Harf Yayınları, 2012.
- Sune, Engin, "Non-Western International Relations Theory and Ibn Khaldun", *All Azimuth*, Vol.5, No.1 (2016):79-88.
- Temaluru, Thomas Bagus Putera, "Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol.5, No.2 (2016): 572-583.
- Thamrin, Mahandis Yoanata. June 6th, 2019, "Migrasi Manusia dan Perjalanan Melanesia di Indonesia." *National Geographic*, 6 Juni 2019. Diakses 10 Februari 2020. <https://nationalgeographic.grid.id/read/131736895/migrasi-manusia-dan-perjalanan-sejarah-melanesia-di-indonesia?page=2>. Theo P.A Van Den Broek dan Hernawan, J. Budi, *Memoria Passionis di Papua*. Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 2001.
- Utama, Abraham, "Pemerintah Indonesia 'tak bisa' cegah negara Pasifik angkat isu Papua di PBB." *BBC*, 13 Desember 2018. Diakses 23 Februari 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41764268>.
- Webb-Gannon, Camelia, "Merdeka in West Papua: Peace, Justice and Political Independence, *Anthropologica*, Vol. 56, No.2 (2014):353-367.
- Webb-Gannon and Webb, "Musical Melanesianism: Imagining and Expressing Regional Identity and Solidarity in Popular Song and Video", *Contemporary Pacific*, Vol.28, No.1 (2016): 59-95.

- Widjojo, Muridam S., Adriana Elisabeth, Rosita Dewi, et al. *Papua Road Map: Menegosiasikan Masa Lampau, Memperbaiki Masa Kini, dan Mengamankan Masa Depan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008.
- Worabay, David. "Bishops from New Zealand and Polynesia issue joint protest on West Papua abuses." *Anglican Communion News Service*, 17 Desember 2018. Diakses 27 Februari 2020. <https://www.anglicannews.org/news/2018/12/bishops-from-new-zealand-and-polynesia-issue-joint-protest-on-west-papua-abuses.aspx>